

**IMPLEMENTASI *THE WOMEN, PEACE, AND SECURITY PROGRAMME* TERHADAP
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI UGANDA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

DWIYANA AULIA

E061181518

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI *THE WOMEN, PEACE, AND SECURITY PROGRAMME* TERHADAP
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI UGANDA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

DWIYANA AULIA

E061181518

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI *THE WOMEN, PEACE AND SECURITY PROGRAMME* TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI UGANDA

N A M A : DWIYANA AULIA

N I M : E061181518

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 23 September 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

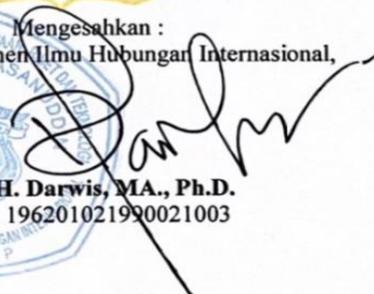

Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,




Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI *THE WOMEN, PEACE AND SECURITY PROGRAMME* TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI UGANDA

NAMA : DWIYANA AULIA

NIM : E061181518

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 24 Agustus 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

2. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiyana Aulia
NIM : E061181518
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

***“Implementasi The Women, Peace, and Security Programme terhadap
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Uganda”***

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain kecuali kutipan dari ringkasan yang setiap salah satunya telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Agustus 2022

Yang Menyatakan:



Dwiyana Aulia

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini sampai akhir dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini sangat banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, semangat, nasihat, serta doa yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua saya, Abdul Kadir, SE dan Sitti Fatimah, SE yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menempuh kehidupan perkuliahan dengan baik yang juga senantiasa selalu mengingatkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang status sosial ataupun penampilan seseorang.
2. Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan ibu Nurjannah Abdullah, S.IP, MA selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, dan ilmu yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Darwis, MA, Ph. D selaku ketua departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Bapak Aswin Baharuddin, S. IP, MA selaku sekretaris departemen Ilmu Hubungan Internasional yang senantiasa memberikan masukan, bimbingan, ilmu, dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA, Bapak Drs. H. Imran Hanafi, MA., M.Ec, Bapak Dr. H. Adi Suryadi B., MA, Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si, Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si, Bapak Muhammad Nasir Baddu, Ph. D, Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si, Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP, Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si, Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si, Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si, Bapak Bama Andika Putra, S.IP, MIR, dan Bapak

Abdul Razak Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR selaku dosen departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

5. Seluruh staf dan pegawai departemen Ilmu Hubungan Internasional khususnya Ibu Rahma dan Bapak Dayat yang telah membantu penulis dalam mengurus berkas akademik selama proses perkuliahan berlangsung hingga membantu persiapan ujian penulis.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga staff dan pegawai Universitas Hasanuddin yang telah membantu mempermudah penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses perkuliahan dan berkas persiapan ujian.
7. Jantung, sahabat-sahabat saya Wafiqah Azzahrah Farid, Rini Dwi Ariyani, dan Nurul Annisa yang telah mewarnai hari-hari perkuliahan penulis, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan waktu yang telah dikorbankan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih karena selalu menjadi pendengar yang baik atas semua keluhan yang dirasakan penulis pada saat proses perkuliahan berlangsung.
8. KBM, perkumpulan sahabat-sahabat saya dari TK sampai kuliah terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mulai dari saat penulis masuk dunia perkuliahan hingga saat ini, semoga kita semua diberkahi kesuksesan.
9. Rekan Reforma 2018 yang ikut membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung, semoga kita semua bisa lulus dengan hasil yang memuaskan.

Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga kedepannya penulis dapat tetap berkontribusi dan menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. Akhir kata penulis kembali mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 10 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Republik Uganda merupakan salah satu negara di Afrika Timur yang pernah mengalami perang saudara dan menyebabkan banyak perempuan Uganda yang mengalami kerugian. Sejak tahun 2008 Uganda telah menerapkan *National Action Plan III* pada resolusi 1325 terkait *Women, Peace, and Security* yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, serta pembangunan dan pemulihan perdamaian pasca konflik. Pemerintah Uganda mengajak *UN Women* untuk menjalankan dan membuat program seperti forum pelatihan peningkatan *skill* dan mediasi serta resolusi konflik kepada perempuan Uganda. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan tantangan *UN Women* dalam implementasi *The Women, Peace, and Security Programme* terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik di Uganda. Sedangkan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah konsep organisasi internasional, feminisme, dan pemberdayaan perempuan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yang jenis penelitian dan tahapan risetnya memanfaatkan data deskriptif seperti kata-kata yang tertulis dalam buku, jurnal, maupun berita. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka selanjutnya penulis melakukan reduksi data, kemudian menyajikan data, dan selanjutnya menarik kesimpulan yang kemudian ditulis dalam skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui implementasi *The Women, Peace, and Security Programme* di Uganda telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan untuk ikut terlibat dalam resolusi konflik. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan Uganda dalam resolusi konflik yaitu membuat beberapa forum pelatihan untuk perempuan Uganda baik itu perempuan yang berasal dari *local community* maupun komunitas pengungsi. *UN Women* dan aktor lainnya seperti *The Peace Centre* telah berhasil membuat beberapa forum pelatihan di beberapa distrik di Uganda untuk melatih kemampuan perempuan dalam melakukan proses mediasi dan resolusi konflik, *skill report*, serta mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini konflik. Tak hanya itu, jumlah perempuan yang menjadi Mediator Perdamaian Perempuan, Komite Perdamaian Distrik juga mengalami peningkatan. Dalam proses implementasi *WPS Programme*, *UN Women* mengalami tantangan seperti pada saat awal munculnya Covid-19 pemerintah Uganda melakukan *lockdown* sehingga aktivitas masyarakat dan pemerintah dikurangi sehingga forum pelatihan tidak dilaksanakan.

Kata Kunci: *WPS Programme*, Resolusi 1325, *UN Women*, Resolusi Konflik, *The Peace Centre*

ABSTRACT

The Republic of Uganda is one of the countries in East Africa that has experienced civil war and caused many Ugandan women to suffer losses. Since 2008 Uganda has implemented the National Action Plan III on resolution 1325 related to Women, Peace, and Security which aims to increase women's participation in conflict prevention and resolution, as well as post-conflict peace building and restoration. The Ugandan government invites UN Women to run and create programs such as skills improvement training forums and mediation and conflict resolution for Ugandan women. The purpose of writing this thesis is to find out how the role and challenges of UN Women in implementing The Women, Peace, and Security Program towards increasing women's participation in conflict resolution in Uganda. While the concepts used in writing this thesis are the concepts of international organizations, feminism, and women's empowerment. The method used in writing this thesis is a qualitative research method whose types of research and research stages utilize descriptive data such as words written in books, journals, and news. After getting the required data, then the writer performs data reduction, then presents the data, and then draws conclusions which are then written in this thesis. The results of this study indicate that the implementation of The Women, Peace, and Security Program in Uganda has succeeded in increasing the participation of women to get involved in conflict resolution. The strategy taken to increase the participation of Ugandan women in conflict resolution is to create several training forums for Ugandan women, both women from local communities and refugee communities. UN Women and other actors such as The Peace Center have succeeded in establishing several training forums in several districts in Uganda to train women's abilities in mediation and conflict resolution processes, reporting skills, and identifying early warning signs of conflict. Not only that, the number of women who become Women Peace Mediators, District Peace Committees has also increased. In the process of implementing the WPS Program, UN Women experienced challenges such as at the beginning of the emergence of Covid-19, the Ugandan government locked down so that community and government activities were reduced so that training forums were not carried out.

Keywords: WPS Program, Resolution 1325, UN Women, Conflict Resolution, The Peace Center

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Batasan dan Rumusan Masalah	7
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D.Kerangka Konseptual	9
E.Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A.Organisasi Internasional	22
B.Feminisme.....	30
C.Pemberdayaan Perempuan.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM.....	49
A.United Nations Women (UN Women).....	49
B.Kondisi Kesetaraan Gender di Uganda	64
C.The Women, Peace, and Security Programme di Uganda.....	81
BAB IV ANALISIS DAN DISKUSI	88
A.Implementasi The Women, Peace, and Security Programme terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Resolusi Konflik di Uganda.	89
B.Tantangan Implementasi The Women, Peace, and Security Programme terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Resolusi Konflik di Uganda.....	135

BAB V PENUTUP	139
A.Kesimpulan.....	139
B.Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual	9
-----------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan ekonomi Uganda per sektor selama lima tahun terakhir	2
Gambar 2 Kondisi Sosial Uganda.....	66
Gambar 3 Status sekolah orang berusia 6-24 tahun pada 2019/20 (%)	70
Gambar 4 Angka Partisipasi Rata-rata di Sekolah Dasar dari 2012-2020 (%)	72
Gambar 5 Tingkat Pendaftaran Rata-rata di Sekolah Menengah dari 2012-2020 (%)	72
Gambar 6 Tingkat Pendaftaran Rata-rata di Sekolah Menengah dari 2012-2020 (%)	73
Gambar 7 Partisipasi Politik Perempuan Uganda.....	74
Gambar 8 Kondisi Ekonomi Uganda.....	81
Gambar 9 Presiden Uganda meresmikan NAP III dalam WPS 2021-2025.....	90
Gambar 10 Roadmap Pengembangan NAP III	92
Gambar 11 The Peace Centre memfasilitasi pertemuan antara Komite Perdamaian Distrik dengan Mediator Perdamaian Perempuan	102
Gambar 12 Proses Pelatihan Decision Making dan Conflict Resolution.....	104
Gambar 13 Kasus yang Diselesaikan oleh Mediator Perdamaian Perempuan.....	105
Gambar 14 Kasus yang dirujuk oleh mediator perdamaian perempuan	123
Gambar 15 Program Women at the Centre of Sustaining Peace in Uganda	124
Gambar 16 Proses Pelatihan Skill Report	127
Gambar 17 Perempuan Distrik Wakiso dalam Pelatihan Resolusi Konflik.....	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Strategis Fokus Area UN Women di Negara Kawasan Afrika.....	6
Tabel 2	Distribusi orang 6 tahun sampai 24 tahun menurut status sekolah (%)	71
Tabel 3	Perwakilan di Parlemen Uganda	75
Tabel 4	Distribusi usia kerja dan penduduk yang bekerja 14-64 tahun (%)	79
Tabel 5	Distribusi presentase penduduk yang bekerja berdasarkan sektor pekerjaan	80
Tabel 6	Peran dan Tanggung Jawab Aktor dalam proses implementasi WPS	94
Tabel 7	Keberhasilan Komite Perdamaian Distrik	106
Tabel 8	Perwakilan Gender dalam Komite Perdamaian Distrik	114
Tabel 9	Keberhasilan Mediator Perdamaian Perempuan	115

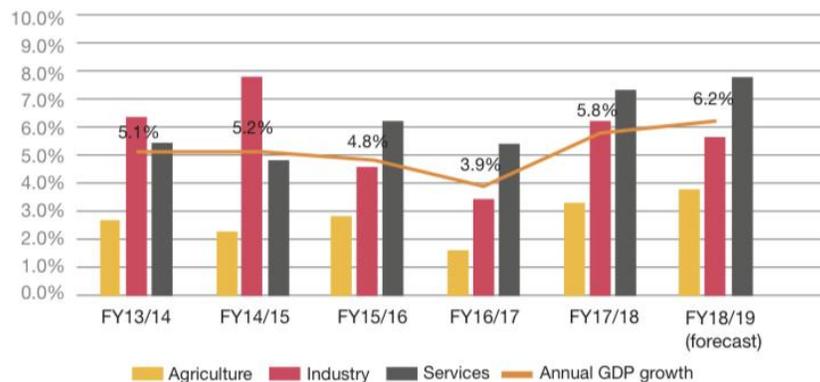
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Uganda merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Afrika Timur. Pada sebelah timur negara Uganda berbatasan langsung dengan negara Kenya, di sebelah utara berbatasan dengan negara Sudan, pada sebelah barat berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo, di barat daya berbatasan dengan negara Rwanda, dan pada bagian selatan berbatasan langsung dengan negara Tanzania. Kampala merupakan ibukota dari negara Uganda (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi, 2018). Pada tahun 2022, Uganda diperkirakan memiliki populasi sebanyak 45,7 juta penduduk dan 51% dari jumlah populasi tersebut adalah perempuan (United Nations Women, 2022a). Uganda merupakan salah satu negara di kawasan Afrika yang pernah mengalami perang saudara. Perang saudara di Uganda terjadi pada tahun 1962 sampai tahun 1986 dan masing-masing terjadi pada era kepemimpinan yang berbeda (Golooba-Mutebi, 2008). Mulai dari era Milton Obote pada tahun 1962-1971, pada era Idi Amin pada tahun 1971-1979, dan pada tahun 1980-1985 di bawah kepemimpinan Obote, dan berakhir pada tahun 1986 di masa Perlawanan Nasional Pergerakan Pemerintahan. Uganda telah mengalami perang saudara beberapa kali selama pergantian periode kepemimpinan pemerintahan sejak awal kemerdekaan Uganda pada tahun 1962 (Rugumamu & Gbla, 2004).

Kondisi perekonomian di Uganda pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 4,4% dan Produk Domestik Bruto (PDB) Uganda mencapai peningkatan sebesar US\$27,47 milyar dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita mencapai US\$ 2.033, 3. (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi, 2018). Pada awalnya, Uganda mengalami penurunan ekonomi pada tahun 2017, tetapi pada tahun 2018 Uganda telah menunjukkan peningkatan ekonomi (Pricewaterhouse Cooper, 2019). Berikut di bawah ini diagram yang menjelaskan secara detail kondisi perekonomian di Uganda selama lima tahun terakhir.



Gambar 1 Pertumbuhan ekonomi Uganda per sektor selama lima tahun terakhir

Sumber: Pricewaterhouse Coopers, 2019

Berdasarkan bagan diatas, pada tahun 2017 sampai tahun 2019 Uganda mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9% sampai 6,2%. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2018-2019 merupakan suatu pertumbuhan ekonomi yang pesat yang terjadi sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 Uganda hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9%. Pemerintah Uganda berusaha melakukan upaya

untuk memajukan kondisi perekonomiannya melalui beberapa sektor seperti pada sektor pertanian, industri, serta kegiatan ekspor. Sektor pertanian dan kegiatan ekspor yang mendukung perkembangan ekonomi yang terjadi di Uganda pada tahun 2017 sampai 2019 (Pricewaterhouse Coopers, 2019). Dengan melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan hasil sektor industri, kegiatan ekspor, dan sektor pertanian, pemerintah Uganda telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan telah membuat negaranya bangkit dari keterpurukan kondisi ekonomi pada tahun 2017 yang pada saat itu pertumbuhan ekonomi Uganda hanya sebesar 3,9% saja.

Uganda merupakan negara yang paling depan di antara negara-negara Afrika Sub-Sahara yang mengakui bahwa terdapat hubungan yang mempengaruhi antara pertumbuhan ekonomi dan masalah kesetaraan gender di negara-negara yang ada di Afrika (Ellis et al., 2006). Meskipun Uganda mengalami pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tersebut tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Uganda, sebab penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan masih rendah (Pricewaterhouse Cooper, 2019). Salah satu aspek yang membuat kurangnya penciptaan lapangan kerja di Uganda adalah terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk membuka atau mencari lapangan kerja baru, sebab 77% perempuan di Uganda bekerja pada sektor pertanian dan mereka tidak mempunyai hak dari hasil bertani yang mereka hasilkan. Tak hanya itu, mereka juga tidak dapat memiliki hak kepemilikan tanah untuk dijadikan sebagai ladang pertanian sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018). Meskipun kondisi perekonomian di Uganda meningkat, hal tersebut tidak

menjamin permasalahan kemiskinan yang di alami oleh Uganda berkurang sebab penciptaan lapangan kerja baru yang tersedia masih sangat minim. Sehingga, hal tersebut membuat kondisi perekonomian di Uganda belum stabil karena masih tingginya angka kemiskinan yang terjadi di negaranya.

Salah satu organisasi internasional yang ikut membantu memperjuangkan hak-hak perempuan Uganda adalah *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women). *UN Women* merupakan entitas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tanggal 2 Juli 2010 (Suri et al., 2020). Organisasi ini berdiri untuk membantu perempuan dan perempuan di bawah umur agar hak-hak mereka tidak disalahgunakan oleh oknum lain, organisasi ini juga sudah ada hampir di tiap-tiap negara khususnya negara yang sering terjadi konflik. *UN Women* melakukan kerja sama dengan pemerintah serta masyarakat di tiap-tiap negara anggota untuk membuat suatu undang-undang, program, ataupun kebijakan untuk memastikan hak-hak perempuan di seluruh dunia terpenuhi. Salah satu tugas utama *UN Women* adalah memastikan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan selalu menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat dunia (Sari, 2019). Oleh karena itu, *UN Women* selalu berupaya untuk melakukan koordinasi dengan negara-negara khususnya negara yang sering terlibat konflik untuk membantu negara tersebut dalam upaya pemberdayaan perempuan dengan membuat program-program yang nantinya bisa diterapkan pada suatu negara yang memiliki permasalahan terkait pemberdayaan perempuan.

Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa *UN Women* memiliki delapan area fokus strategis dalam melakukan penyelesaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu, fokus dalam urusan kepemimpinan dan pemerintahan, melakukan pemberdayaan terkait perekonomian perempuan, menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan, melakukan perdamaian dan keamanan, melakukan perencanaan dan mengatur anggaran, norma-norma global, melakukan pembangunan berkelanjutan, serta industri ekstraktif. Tidak semua delapan area fokus strategis tersebut dilakukan oleh *UN Women* di negara-negara yang terdapat di kawasan Afrika salah satu contohnya adalah negara Zambia. Pada negara Zambia, *UN Women* hanya fokus pada industri ekstraktif saja. Sedangkan pada negara Uganda, *UN Women* melakukan kedelapan poin area fokus strategis untuk membantu pemerintah Uganda dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan perempuan di Uganda (United Nations Women, 2016b). Tidak semua area fokus strategi yang dilakukan oleh *UN Women* diterapkan pada semua negara, karena permasalahan-permasalahan terkait pemberdayaan perempuan khususnya di negara kawasan Afrika memiliki kasus yang berbeda-beda sehingga proses penyelesaian permasalahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan negara yang mengalami permasalahan pemberdayaan perempuan. Berikut akan ditampilkan tabel strategi fokus area yang dilakukan oleh *UN Women* di negara-negara kawasan Afrika:

Tabel 1 Strategis Fokus Area UN Women di Negara Kawasan Afrika

Operational Units	Leadership and Governance	Women's Economic Empowerment	Ending Violence against Women	Peace and Security	Planning and Budgeting	Global Norms	Sustainable Development Goals	Extractive Industries
ESARO	X	X	X	X	X	X	X	
Burundi	X	X	X	X	X	X	X	
DRC	X	X	X	X	X	X	X	X
Ethiopia	X	X	X		X	X	X	
Kenya	X	X	X	X	X	X	X	X
Malawi	X	X	X		X	X	X	X
Mozambique	X	X	X	X	X	X	X	X
Rwanda	X	X	X	X	X	X	X	X
Somalia	X		X	X	X	X	X	
South Africa	X	X		X	X	X	X	X
South Sudan	X	X		X	X	X	X	
Sudan	X	X	X	X	X	X	X	
Tanzania	X	X	X	X	X	X	X	X
Uganda	X	X	X	X	X	X	X	X
Zambia								X
Zimbabwe	X	X	X	X	X	X	X	

Sumber: United Nations Women, 2016

Salah satu program yang dilakukan *UN Women* di Uganda yaitu program perdamaian dan keamanan perempuan atau *The Women Peace and Security Programme*. Program ini, sudah berjalan selama tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan mendapat dukungan berupa dana dari pemerintah Norwegia. Program ini dikembangkan berdasarkan latar belakang konflik perang saudara yang pernah terjadi di Uganda. Meskipun perang saudara sudah tidak terjadi lagi, *UN Women* merasa bahwa keadilan serta keamanan perempuan Uganda masih kurang. Oleh karena itu, *UN Women* mengembangkan program ini di negara Uganda. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik, membuat resolusi konflik, pembangunan perdamaian dan pemulihan, serta membuat tempat yang memungkinkan agar program ini berjalan dengan baik (United Nations Development

Programme, 2021a). Meskipun sudah tidak ada perang aktif yang terjadi di Uganda, *UN Women* menilai bahwa mereka tetap perlu membuat suatu program yang dapat menjamin keamanan serta perdamaian perempuan Uganda. Dengan adanya *The Women Peace and Security Programme* diharapkan hak-hak perempuan dapat lebih terjamin, seperti perempuan dapat mengambil peran dalam pengambilan keputusan terkait upaya pencegahan konflik dan masalah lainnya serta terjaminnya keselamatan perempuan, kesehatan fisik dan mental, serta hak asasi manusia mereka lebih dihormati. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terkait “Implementasi *The Women Peace and Security Programme* terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan di Uganda”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penulisan penelitian ini dibatasi oleh tahun penelitian yaitu pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Penulisan ini berfokus pada peran *UN Women* yang merupakan salah satu organisasi internasional untuk melakukan pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender di Uganda. *UN Women* berupaya untuk membantu pemerintah Uganda untuk melakukan pemberdayaan perempuan, sebab akses informasi serta sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Uganda belum memadai untuk melakukan program-program pemberdayaan perempuan. Adapun cakupan program *UN Women* yang akan diteliti yaitu, pada program sektor perdamaian dan keamanan perempuan atau *The Women Peace and Security Programme*. Oleh karena itu, *UN Women* dan pemerintah Uganda bekerja sama untuk melakukan pemberdayaan perempuan Uganda.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menjabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *United Nations Women* dalam implementasi *The Women Peace and Security Programme* terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan di Uganda?
2. Bagaimana tantangan *United Nations Women* dalam implementasi *The Women Peace and Security Programme* terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan di Uganda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peran *United Nations Women* dalam implementasi *The Women Peace and Security Programme* terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan di Uganda.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dialami oleh *United Nations Women* dalam implementasi *The Women Peace and Security Programme* terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan di Uganda.

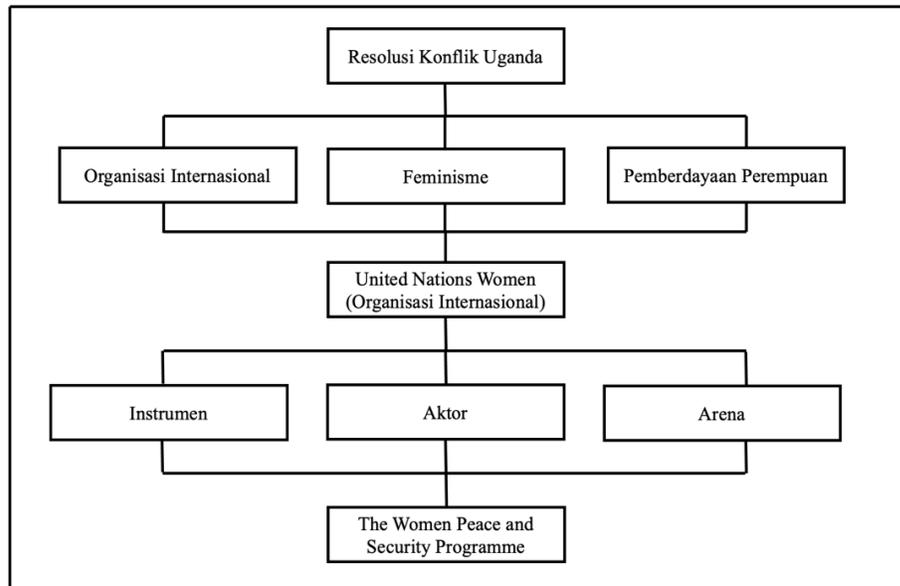
Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai:

1. Bagi pemerhati isu-isu di kawasan Afrika, penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman mengenai peran *United Nations Women* dalam

implementasi *The Women Peace and Security Programme* terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan di Uganda.

2. Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa departemen Ilmu Hubungan Internasional untuk mengetahui peran serta tantangan organisasi internasional seperti *United Nations Women* dalam implementasi *The Women Peace and Security Programme* terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan di Uganda.

D. Kerangka Konseptual



Bagan 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga konsep utama yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu konsep organisasi

internasional, konsep feminisme, dan konsep pemberdayaan perempuan. Ketiga konsep ini akan digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas. Berikut adalah penjelasan dari ketiga konsep tersebut:

1. Organisasi Internasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep organisasi internasional untuk menganalisis peran serta tantangan *United Nations Women* dalam implementasi *The Women Peace and Security Programme* terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan di Uganda. Organisasi internasional merupakan sebuah struktur yang berkelanjutan yang pada saat proses pembentukannya dilatarbelakangi oleh perjanjian antara anggota-anggota yang masuk dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Organisasi internasional melintasi batas-batas negara yang sesuai dengan struktur organisasi agar proses pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik (Valensy, 2017). Jadi, organisasi internasional dibentuk untuk menciptakan kedamaian antar negara serta dapat menjadi tempat untuk menyelesaikan suatu permasalahan baik itu permasalahan sosial, keamanan, ekonomi, dan politik.

Terdapat tiga karakteristik organisasi internasional yaitu keanggotaan, maksud dan tujuan, dan struktur. Dalam sebuah organisasi internasional harus memiliki anggota dari dua atau lebih negara berdaulat, keanggotaan organisasi internasional tidak harus dari perwakilan resmi suatu negara seperti Menteri atau yang lainnya. Adapun karakteristik kedua dari organisasi internasional yaitu maksud dan tujuan, pada saat

organisasi internasional dibentuk pasti pada awalnya mempunyai maksud dan tujuan. Karakteristik yang terakhir pada organisasi internasional yaitu struktur, sebuah organisasi harus mempunyai struktur sendiri yang dibuat berdasarkan hasil perundingan dari anggota-anggota yang tergabung dalam organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama (Adita, 2017). Organisasi internasional memiliki tiga karakteristik utama yang dapat mendukung jalannya program yang dibuat. Tak hanya itu, organisasi internasional dibentuk untuk mencapai kepentingan bersama bukan untuk mencapai kepentingan pribadi masing-masing anggota yang terlibat dalam organisasi internasional tertentu.

Jadi, organisasi internasional dapat dikatakan sebagai suatu wadah kerja sama yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor yang melintasi perbatasan negara dan struktur organisasi internasional yang menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan fungsi dari organisasi internasional dan bersifat berkelanjutan. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan hasil perjanjian antara anggota seperti pemerintah ataupun non pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai kepentingan bersama (Ardi, 2019). Organisasi internasional terbagi menjadi dua yaitu *Intergovernmental Organizations* (IGO) dan *Non-governmental Organizations* (NGO). *Intergovernmental Organizations* (IGO) merupakan sebuah organisasi yang anggotanya berasal dari beberapa negara yang ada di dunia serta mempunyai kegiatan di beberapa negara tertentu yang telah dibuat melalui perjanjian antar negara yang turut terlibat dalam organisasi tersebut dan menghasilkan sebuah perjanjian, undang-undang, ataupun piagam (Karns et al., 2015). Berdasarkan pemaparan diatas, maka

UN Women merupakan salah satu *Intergovernmental Organizations* (IGO) sebab *UN Women* merupakan organisasi internasional yang menghasilkan sebuah program ataupun undang-undang terkait pemberdayaan perempuan. Tak hanya itu, *UN Women* juga merupakan bawahan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai anggota dari perwakilan beberapa negara yang ada di dunia.

Adapun lima fungsi dari organisasi internasional, yaitu: (Anissa, 2021)

1. Norma, organisasi internasional dapat membangun nilai-nilai tertentu di seluruh dunia dan norma-norma yang dibangun oleh organisasi tersebut dapat diterapkan dan berkembang di kehidupan bermasyarakat meskipun nilai-nilai yang dibangun tersebut tidak terikat dan cukup lemah.
2. Informasi, organisasi internasional juga merupakan sebuah penyalur informasi dan media komunikasi bagi masyarakat dunia sesuai dengan apa yang telah anggota organisasi diskusikan dan putuskan dalam perundingan mereka.
3. Operasional, organisasi internasional sebagai media operasional dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional sesuai dengan bidang apa organisasi tersebut berjalan apakah dalam permasalahan kesehatan, imigrasi, dll.
4. Pembuatan kebijakan, organisasi internasional mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan ataupun aturan sesuai dengan sistem politik internasional yang berlaku sebab tidak ada yang membuat kebijakan untuk organisasi selain dari organisasi itu sendiri.

5. Pengawasan, dengan menerapkan kebijakan yang telah dibuat organisasi internasional dapat melakukan pengawasan kepada negara-negara yang menjadi anggota organisasi apabila ada anggota yang tidak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh organisasi.

Organisasi internasional juga mempunyai tiga peran utama, yaitu: (Suri et al., 2020)

1. Organisasi internasional sebagai instrumen.

Maksud dari organisasi internasional sebagai instrumen yaitu peran organisasi internasional dijadikan sebagai alat untuk para anggota organisasi mencapai tujuan kepentingan nasional mereka. Dengan adanya peran organisasi internasional dapat lebih mudah untuk mendapatkan keputusan yang akan disetujui dalam perundingan yang dilakukan dalam *Intergovernmental Organizations* (IGO) tertentu sebab para anggota dari organisasi merupakan perwakilan dari negara-negara yang ada di dunia sehingga dapat dengan mudah mencapai keputusan dalam organisasi.

2. Organisasi internasional sebagai arena.

Dalam hal ini, organisasi internasional dijadikan sebagai forum atau tempat dilaksanakannya kegiatan organisasi yang nantinya para anggota organisasi dapat bertemu dan berdiskusi untuk membahas tugas-tugas ataupun permasalahan yang sedang terjadi. Disini juga nantinya para anggota organisasi akan berdiskusi guna mendapatkan hasil keputusan bersama yang nantinya akan menjadi sebuah perjanjian, piagam, ataupun undang-undang.

3. Organisasi internasional sebagai aktor.

Organisasi internasional dapat menjalankan perannya secara independen dan dalam membuat suatu keputusan organisasi internasional dapat memutuskan hasil tanpa terpengaruh oleh sesuatu yang berasal dari luar organisasi itu sendiri. Dalam hal ini organisasi internasional juga mampu untuk mempengaruhi tindakan apa yang akan dilakukan oleh para anggota organisasi. Meskipun pernyataan tersebut mendapat kritikan karena banyak anggota organisasi yang berasal dari beberapa negara tertentu tetapi organisasi internasional tetap memiliki hak untuk mencapai hasil keputusan mereka sendiri tanpa adanya gangguan dari luar organisasi mereka.

2. Feminisme

Konsep feminisme merupakan sebuah alat bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya agar perempuan bisa mendapatkan posisi yang sama dengan kaum laki-laki baik itu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Feminisme menjadi sebuah gerakan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan hak agar mereka dapat menentukan nasib mereka sendiri. Feminisme memperjuangkan dua hal yaitu, kesetaraan perempuan dengan laki-laki serta perempuan dapat memperjuangkan apa pun yang mereka anggap baik dalam kehidupan mereka tanpa ada gangguan dari pihak lain (Arizah, 2020). Dengan munculnya teori feminisme, diharapkan dapat membuat seluruh perempuan yang ada di dunia mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki dalam menjalankan kehidupan mereka. Gerakan

feminisme juga dapat membantu perempuan melakukan apa pun yang ingin mereka lakukan untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa adanya gangguan dari orang lain.

Agenda feminisme masuk pada ilmu kajian Hubungan Internasional pada tahun 1980 (Nagar, 2016). Para ahli teori feminisme telah berkontribusi pada ilmu kajian Hubungan Internasional dengan melakukan penilaian peran yang akan dilakukan perempuan di kehidupan global. Dengan menggunakan berbagai metodologi, ahli teori feminisme dalam ilmu kajian Hubungan Internasional mendefinisikan kembali konsep kekuasaan, kedaulatan, hegemoni, serta keamanan. Feminisme dalam Hubungan Internasional juga membantu mengungkap bagaimana cara hegemoni maskulinitas yang tertanam dalam kajian politik Hubungan Internasional. Tujuan utama feminisme adalah untuk memahami dan memperbaiki ketidaksetaraan gender yang masih sering terjadi bahkan masih sering diabaikan oleh masyarakat global (Harel, 2019). Dalam teori feminisme ini, bukan hanya membahas mengenai bagaimana cara menyetarakan kehidupan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Tetapi, pada teori ini juga membahas terkait kekuasaan, kedaulatan, hegemoni, serta keamanan yang berhubungan dengan maskulinitas yang mempunyai kaitan dengan permasalahan gender yang terjadi di dunia.

Pada teori feminisme, hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara seks sebagai biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Gender telah dipahami sebagai asumsi yang dibangun secara sosial yang ditetapkan pada tubuh perempuan ataupun laki-laki. Hal yang sudah melekat pada kehidupan sosial yaitu perilaku yang dianggap

sesuai dengan sifat laki-laki disebut maskulin, sementara perilaku yang dianggap sesuai dengan sifat perempuan sebagai feminin. Maskulinitas sering dikaitkan dengan berbagai macam hal seperti rasionalitas, kekuasaan, ruang publik, serta kemandirian. Sedangkan feminisme sering dikaitkan dengan irasionalitas, membutuhkan perlindungan, serta ruang privat. Identitas gender yang sudah melekat pada kehidupan sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial maupun interaksi global antara perempuan dan laki-laki. Identitas gender yang telah terkonstruksi secara sosial telah menentukan distribusi kekuasaan yang berdampak pada posisi perempuan dalam politik global bahkan dalam kehidupan sehari-hari (Smith, 2018). Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memahami lebih lanjut mengenai teori feminisme yaitu tentang gender yang telah melekat pada kehidupan sosial. Posisi perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kehidupan sosial memiliki perbedaan karena konstruksi sosial yang telah tertanam sejak dulu, sebagai contoh laki-laki dianggap pantas untuk memegang kekuasaan sedangkan perempuan dinilai belum pantas untuk memegang kekuasaan.

3. Pemberdayaan Perempuan

Secara harfiah, setengah dari populasi penduduk di dunia adalah perempuan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam keluarga, ekonomi, bahkan kekerasan pada perempuan. Masih banyak perempuan yang hidup dalam ketakutan akan kekerasan dan ketidaksetaraan gender. Pemberdayaan perempuan pada dasarnya

merupakan cara untuk meningkatkan status sosial, ekonomi, budaya dan politik perempuan yang secara konvensional kurang beruntung atau terlantar dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika pemberdayaan perempuan berjalan dengan baik, perempuan dapat mendapatkan atau mengumpulkan aset, meningkatkan kondisi finansial, mengembangkan kemampuan untuk mendukung industri bahkan perempuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru (Farzana et al., 2018). Dengan melakukan pemberdayaan perempuan, dapat mengembangkan kehidupan bermasyarakat apabila perempuan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup mereka berarti perempuan dapat membantu negara meningkatkan perekonomiannya dengan membuka dan menciptakan lapangan kerja baru serta mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan mengacu pada kebijakan serta langkah-langkah yang dibuat untuk meningkatkan derajat otonomi serta penentuan nasib diri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses bagi perempuan atau kelompok perempuan untuk menyadari identitas serta kekuasaan mereka dalam semua bidang kehidupan. Dengan memberdayakan perempuan, perempuan nantinya dapat mengambil keputusan untuk merencanakan kehidupan mereka sendiri dan memiliki kontrol untuk hidup di dunia ini. Perempuan dapat memberdayakan hidup mereka sendiri agar mereka dapat lebih mandiri dan berhak untuk menentukan tujuan hidup mereka. Pemberdayaan perempuan pada dasarnya mengacu pada kesadaran perempuan akan situasi mereka yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan,

serta informasi agar perempuan dapat lebih mengambil peran dalam kehidupan sosial (Sama, 2017). Pemberdayaan perempuan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh semua perempuan, khususnya perempuan yang ada dalam kondisi yang tidak baik seperti pada negara yang sering terjadi konflik. Dengan melakukan pemberdayaan, perempuan dapat mengangkat derajat kehidupan mereka dari semua jenis aspek kehidupan agar hak-hak mereka dapat terpenuhi.

Pemberdayaan perempuan juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan dan penguasaan perempuan terhadap sumber daya ekonomi maupun non ekonomi. Terdapat empat hal yang dapat mendukung jalannya upaya pemberdayaan perempuan yaitu, memprioritaskan kelompok perempuan yang tinggal di pedesaan karena potensi mereka belum dimanfaatkan secara optimal dengan membantu mengelola usaha kecil agar usaha tersebut dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi di pedesaan, menyediakan modal bagi kelompok perempuan untuk menjalankan usaha mereka, meningkatkan fasilitas teknologi, informasi, dan komunikasi serta infrastruktur khususnya di pedesaan untuk membantu perempuan mengakses informasi terkini dan membantu pengusaha perempuan memasarkan produk mereka, serta mengoptimalkan peran perempuan dari segala aspek agar kualitas hidup perempuan meningkat dari sebelumnya (Purnamawati & Utama, 2019). Dengan melakukan keempat hal tersebut, upaya pemberdayaan perempuan dapat berjalan dengan baik dan cepat khususnya perempuan yang ada di pedesaan dan yang berada di negara berkonflik agar membuat

perempuan dapat lebih meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tahapannya memanfaatkan data deskriptif, seperti kata-kata yang tertulis pada buku, jurnal, dll ataupun dari lisan orang-orang yang sedang diamati (Anwar, 2021). Tipe kualitatif adalah metode penelitian yang dipergunakan untuk mencari dan memahami suatu permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat seperti masalah-masalah sosial ataupun masalah kemanusiaan. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah penelitian yang proses risetnya tidak didapatkan melalui tahapan statistik atau bentuk perhitungan yang menggunakan angka-angka. Tetapi, meskipun tipe penelitian kualitatif data yang dihasilkan bisa dihitung dan bisa disajikan dalam bentuk angka-angka tetap saja termasuk dalam penelitian bersifat kualitatif (Nugrahani, 2014). Penulis memilih untuk menggunakan tipe kualitatif dalam penelitian ini sebab data yang nantinya akan didapatkan bukan berupa perhitungan angka.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku, jurnal, majalah, brosur, video, berita, dan sebagainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang nantinya akan diteliti (Sarwono, 2006). Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan hasil bacaan dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang dibaca dan dilihat kemudian di parafrase sebelum ditulis dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *library research* (telaah kepustakaan). *Library research* merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, berita, video, dan sebagainya baik itu diperoleh secara *offline* maupun *online* (Rahmadi, 2011). Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai macam jenis bacaan seperti buku, jurnal, serta berita *online* yang terkait dengan sumber masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam teknik analisis data kualitatif terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti melakukan pengumpulan data yang bisa didapatkan dengan cara turun langsung ke lapangan atau dengan menggunakan

cara *library research* seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Tahapan selanjutnya adalah reduksi data, pada tahapan ini penulis nantinya akan memilih data-data yang sudah didapatkan dalam proses pengumpulan data dan penulis akan memilih data-data mana yang akan digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Tahapan ketiga adalah penyajian data, pada tahapan ini penulis akan menyajikan data bisa dalam bentuk diagram ataupun dengan kata-kata yang nantinya akan disusun dalam penulisan penelitian. Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, dalam tahapan ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan yang bisa menyampaikan semua informasi yang telah didapatkan dalam penelitian (Anwar, 2021). Semua tahapan dalam teknis analisis data ini nantinya akan digunakan penulis dalam penelitian ini, agar proses penulisan dapat tersusun dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan organisasi non-profit yang diatur dan didanai oleh negara anggota dari organisasi dan dibentuk untuk mencapai sebuah kepentingan bersama. Dengan mengikuti aturan dan proses yang telah ditetapkan pada saat pembentukan organisasi, organisasi internasional bertujuan untuk memberikan dampak yang baik kepada negara-negara anggota untuk menangani permasalahan sosial, tetapi juga tidak merugikan. Jadi organisasi internasional harus terus melakukan inovasi untuk mengatasi bermacam-macam masalah yang dihadapi oleh negara anggota serta terus memberikan pelayanan terhadap individu untuk mempraktikkan inovasi yang terus mereka kembangkan sesuai dengan permasalahan yang ada (Ambos & Tatarinov, 2022). Dengan melakukan inovasi, organisasi internasional dapat lebih mudah membantu suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini.

Bentuk hubungan kerja sama internasional yang dilakukan oleh antar negara dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti melakukan hubungan diplomasi dan dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional untuk mencapai kepentingan bersama. Kerja sama yang dilakukan antara negara dan organisasi internasional memiliki fungsi dan tujuan masing-masing, sebuah organisasi internasional dapat membantu suatu negara dalam menyelesaikan kasus ataupun konflik yang sedang

terjadi di negara mereka (Nursiam, 2017). Jadi, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting yang dapat membantu sebuah negara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada suatu negara tertentu.

Organisasi internasional merupakan sebuah organisasi yang keanggotaannya mencakup negara-negara. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian atau perjanjian multilateral dan anggotanya terdiri dari lebih dari dua negara. Negara-negara anggota menentukan cara organisasi tersebut berjalan, memberikan suara dalam organisasi, serta menyediakan dana. Pada tahun 2017, ada sekitar 193 negara yang masuk dalam keanggotaan PBB, tetapi sejumlah kecil negara bukan termasuk dalam anggota PBB. Salah satu contohnya adalah Taiwan, Taiwan telah berulang kali meminta untuk dijadikan sebagai anggota PBB tetapi permintaan tersebut di blokir oleh China. China menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya dan tidak diakui sebagai negara merdeka (Abidin, 2016). Negara-negara anggota yang tergabung dalam sebuah organisasi internasional tertentu, akan menentukan bagaimana jalannya organisasi tersebut. Para negara anggota akan membuat suatu aturan atau program yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan oleh sebuah organisasi internasional sesuai dengan bidang organisasi tersebut.

Organisasi internasional mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, resolusi konflik, dan hal lain yang termasuk dalam program kerja organisasi tersebut. Hubungan yang terjalin antara negara dan organisasi

internasional dinilai dapat membantu suatu negara untuk melakukan diplomasi multilateral. Selain melakukan pertemuan bilateral, suatu negara juga bisa mencapai tujuan dan sasaran mereka melalui forum multilateral (Emini & Marleku, 2016). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional telah menjadi bagian penting dari proses pembangunan dan demokratisasi bagi suatu negara.

Salah satu ciri dari organisasi internasional yaitu untuk memenuhi tugas untuk kepentingan publik global atau kepentingan global relevansi publik yang tidak dapat diselesaikan oleh suatu negara tertentu yang terlibat dalam permasalahan tertentu. Ciri yang kedua adalah organisasi internasional harus mempunyai sebuah kantor atau tempat untuk dijadikan sebagai tempat bertemu negara anggota. Organisasi internasional tidak dapat dikatakan sebagai organisasi internasional apabila mereka tidak memiliki kursi, infrastruktur, ataupun dana anggaran. Tiap-tiap organisasi internasional itu berbeda-beda tetapi kebanyakan organisasi internasional memiliki sekretariat permanen, badan pleno untuk dijadikan sebagai tempat anggota bertemu, badan eksekutif yang lebih kecil, serta terkadang membutuhkan majelis tambahan (Golia & Peters, 2020). Organisasi internasional memiliki sebuah ciri-ciri tertentu agar organisasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sebuah organisasi internasional. Ciri-ciri tersebut nantinya akan mendukung jalannya program-program organisasi internasional yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, suatu organisasi internasional pastinya akan menghadapi tantangan tertentu. Tantangan ini terbagi dari beberapa bidang sesuai dengan fokus permasalahan yang akan diselesaikan oleh suatu organisasi internasional

tertentu. Organisasi internasional kemungkinan akan menghadapi tantangan peningkatan reformasi internasional dalam perdagangan dunia, hak kekayaan intelektual, perdagangan jasa, serta masalah investasi yang terkait dengan perdagangan. Adapun tantangan dalam bidang kesehatan yaitu tantangan untuk mengintegrasikan atau mengajak negara-negara berkembang dalam menyelesaikan beberapa masalah, seperti penyelesaian kasus kematian bayi di negara berkembang akibat gizi buruk, dll (Wukari, 2018). Dalam menyelesaikan suatu kasus tertentu, organisasi internasional pasti akan menghadapi beberapa tantangan sebelum menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sebuah organisasi internasional harus lebih cekatan untuk memikirkan bagaimana cara untuk menghadapi tantangan tersebut agar permasalahan awal yang menjadi fokus organisasi tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Organisasi internasional mempunyai tiga peran utama, yaitu: (Suri et al., 2020)

1. Organisasi internasional sebagai instrumen.

Maksud dari organisasi internasional sebagai instrumen yaitu peran organisasi internasional dijadikan sebagai alat untuk para anggota organisasi mencapai tujuan kepentingan nasional mereka. Dengan adanya peran organisasi internasional dapat lebih mudah untuk mendapatkan keputusan yang akan disetujui dalam perundingan yang dilakukan dalam *Intergovernmental Organizations* (IGO) tertentu sebab para anggota dari organisasi merupakan perwakilan dari negara-negara yang ada di dunia sehingga dapat dengan mudah mencapai keputusan dalam organisasi.

2. Organisasi internasional sebagai arena.

Dalam hal ini, organisasi internasional dijadikan sebagai forum atau tempat dilaksanakannya kegiatan organisasi yang nantinya para anggota organisasi dapat bertemu dan berdiskusi untuk membahas tugas-tugas ataupun permasalahan yang sedang terjadi. Disini juga nantinya para anggota organisasi akan berdiskusi guna mendapatkan hasil keputusan bersama yang nantinya akan menjadi sebuah perjanjian, piagam, ataupun undang-undang.

3. Organisasi internasional sebagai aktor.

Organisasi internasional dapat menjalankan perannya secara independen dan dalam membuat suatu keputusan organisasi internasional dapat memutuskan hasil tanpa terpengaruh oleh sesuatu yang berasal dari luar organisasi itu sendiri. Dalam hal ini organisasi internasional juga mampu untuk mempengaruhi tindakan apa yang akan dilakukan oleh para anggota organisasi. Meskipun pernyataan tersebut mendapat kritikan karena banyak anggota organisasi yang berasal dari beberapa negara tertentu tetapi organisasi internasional tetap memiliki hak untuk mencapai hasil keputusan mereka sendiri tanpa adanya gangguan dari luar organisasi mereka.

Tujuan utama dibentuknya sebuah organisasi internasional yaitu menyusun atau membuat sebuah aturan atau program terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia. Tak hanya itu, organisasi internasional juga melibatkan komitmen yang dapat mempengaruhi kedaulatan nasional secara luas. Oleh karena itu negara sangat

memperhatikan siapa yang menjadi bagian dari suatu organisasi internasional (Hooghe et al., 2019). Tujuan dari sebuah organisasi internasional harus mencakup kepentingan global agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pada saat ini dapat dibantu oleh organisasi untuk diselesaikan atau dicari jalan keluarnya.

Dalam konsep organisasi internasional, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh aktor yang masuk dalam organisasi internasional dengan organisasi internasional itu sendiri, karena semua yang terlibat dalam organisasi tersebut mempunyai sifat saling ketergantungan satu dengan yang lain. Hal-hal tersebut seperti orientasi untuk mengatasi kebijakan yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja, jadi diperlukan kolaborasi dari beberapa aktor. Selanjutnya yaitu sifat saling ketergantungan antara aktor yang satu dengan yang lain, yang berarti bahwa bisa aktor lain bisa saja memberikan sumber daya yang dimiliki kepada aktor lainnya. Hal yang terakhir yaitu, interaksi yang kompleks antara aktor satu dengan aktor lainnya, karena setiap aktor mempunyai persepsi sendiri terkait suatu permasalahan, solusi, dan strategi untuk menghadapi konflik (Amici & Cepiku, 2020). Organisasi internasional dan negara anggota bisa saling melengkapi dalam menyelesaikan suatu konflik ataupun permasalahan yang sedang terjadi

Sebelum membuat suatu tujuan dan kegiatan organisasi, organisasi internasional mempunyai sejumlah peranan yang penting, yaitu: (Adita, 2017)

1. Organisasi internasional menyediakan wadah kerja sama antara negara-negara dalam beberapa bidang, kerja sama yang dilakukan akan memberikan keuntungan bagi seluruh anggota organisasi internasional tersebut.

2. Organisasi internasional akan menyediakan perangkat administratif yang akan digunakan dalam pembuatan atau pengambilan keputusan pada saat berlangsungnya rapat ataupun kegiatan organisasi.
3. Organisasi internasional memfasilitasi akses komunikasi dengan negara anggota yang dapat mempermudah kedua belah pihak apabila terjadi suatu masalah.

Untuk mencapai keefektifan dalam mencapai tujuan, organisasi internasional menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (Kharimah, 2019)

1. Level kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Hal ini didasarkan pada pengaturan awal dari organisasi, yang dimana organisasi mempunyai relevansi hubungan dengan tujuan awal pada saat dibentuknya organisasi internasional. Jadi, organisasi yang berkaitan dengan bidang keamanan otomatis harus menjalankan program kerja mereka yang berhubungan dengan keamanan. Meskipun terdapat organisasi yang sama-sama bergerak pada penyelesaian konflik, namun kemampuan penyelesaian serta program dan fasilitas yang digunakan dalam penyelesaian konflik tersebut memiliki cara yang berbeda.

2. Level kerja sama dengan pihak lain.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara dari suatu organisasi internasional melakukan kerja sama dengan pihak lain. kerja sama yang dilakukan oleh organisasi internasional dengan negara-negara tentunya memiliki cara penyelesaian yang berbeda, sebab permasalahan yang dialami oleh negara tidak

semuanya sama. Oleh karena itu, organisasi internasional menggunakan level kerja sama dengan pihak lain dengan menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Level pembangunan strategi.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara sebuah organisasi internasional membentuk strategi-strategi yang baru dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Apabila suatu konflik terjadi di suatu negara, negara tersebut pasti sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut dan apabila negara tidak berhasil dalam upaya penyelesaian konflik, maka organisasi internasional harus turun dengan menggunakan cara dan inovasi yang baru untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi, organisasi internasional harus terus mengembangkan dan meningkatkan pembangunan strategi untuk menyelesaikan konflik.

Mekanisme yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk memfasilitasi implementasi kerangka kerja mereka dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu, mekanisme bantuan, mekanisme kepatuhan, mekanisme advokasi, dan mekanisme pemantauan. Mekanisme bantuan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada negara anggota dalam melakukan implementasi instrument organisasi internasional. Adapun mekanisme kepatuhan bertujuan untuk memverifikasi implementasi instrumen organisasi internasional dan mendukung kesesuaiannya yang bergantung pada kerangka hukum, tindakan perbaikan tertentu (formal atau informal) yang dapat dilakukan apabila terjadi ketidakpatuhan. Mekanisme advokasi bertujuan untuk meningkatkan visibilitas instrumen internasional, memperkuat relevansi dalam

konteks yang lebih luas dan mendorong kepemilikan oleh negara anggota. Sedangkan mekanisme pemantauan bertujuan untuk melacak penggunaan instrumen organisasi internasional untuk tujuan bantuan, penilaian kepatuhan, atau advokasi (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). Dengan adanya mekanisme ini, dapat mempermudah negara anggota dan organisasi internasional itu sendiri untuk melakukan implementasi program kerja yang sudah ditetapkan bersama.

B. Feminisme

Konsep feminisme telah mengalami transformasi epistemologi pada tahun 1960-an, pada tahun tersebut bermunculan gerakan perempuan dalam konteks pembebasan dan emansipasi wanita dalam struktur sosial bermasyarakat. Setelah munculnya gerakan perempuan pada tahun 1960, muncul tiga perubahan yang terjadi dalam kehidupan global yang berpengaruh pada gerakan feminisme. Perubahan yang pertama yaitu gerakan feminisme semakin meluas hingga mencakup kaum muda pada tingkat universal maupun lokal dan membentuk sebuah kelompok-kelompok gerakan feminisme. Perubahan yang selanjutnya yaitu konsep feminisme sudah mulai untuk menangani permasalahan individu selain masalah universal yang berkaitan dengan gender, ras, etnis, dan bahasa. Sedangkan perubahan yang terakhir yaitu konsep feminisme berproses paradoks dan dramatis dalam kehidupan bermasyarakat yang dibentuk oleh kelompok feminisme (Zembat, 2017). Proses perkembangan feminisme yang terjadi seperti perubahan global dan lokal telah menyebabkan perkembangan

kelompok feminisme sudah mulai menangani permasalahan yang terjadi baik itu dalam skala individu maupun kelompok tertentu.

Konsep feminisme masuk dalam kajian ilmu hubungan internasional pada abad 80-an akhir, yang direfleksikan dengan teori-teori lain seperti teori kritis atau teori post-positivisme (Rashid, 2021). Salah satu definisi feminisme yang paling ringkas menurut Jane Freedman yaitu feminisme adalah istilah yang muncul setelah perempuan mulai mempertanyakan status inferior mereka dan menuntut perbaikan dalam posisi status sosial di kehidupan bermasyarakat (Kaur, 2021). Jadi konsep feminisme muncul dan fokus untuk membuat perempuan setara dengan laki-laki baik itu dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tak hanya itu, dengan munculnya konsep feminisme dapat membantu perempuan untuk bebas dalam menentukan jalan hidup mereka tanpa adanya intervensi dari orang lain.

Teori-teori feminisme dalam hubungan internasional dapat menunjukkan dan memberikan pemahaman terkait bagaimana pengalaman perempuan dan orang lain yang selama ini terpinggirkan. Dengan menggunakan konsep gender, keilmuan hubungan internasional menunjukkan secara implisit sudut pandang maskulin atau bagaimana situasi dan posisi laki-laki yang selalu unggul dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum feminisme mengungkapkan bagaimana gender bekerja dengan merefleksikan apa yang sudah ada dalam realitas sosial, termasuk politik dunia (Yesyca, 2017). Konsep feminisme muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul terkait mengapa perempuan memiliki hak yang lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam kehidupan, sosial, dan politik.

Definisi lain menyebutkan bahwa konsep feminisme mengkaji ketidaksetaraan gender, peran sosial perempuan, pengalaman, minat dan pekerjaan di berbagai macam bidang seperti antropologi, sosiologi, komunikasi, politik, ekonomi, rumah tangga, bahasa, dan filsafat. Definisi dasar dari feminisme yaitu laki-laki dan perempuan harus setara secara politik, ekonomi, dan sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep feminisme muncul untuk: (Zembat, 2017)

1. Bekerja untuk meningkatkan kesetaraan gender, kaum feminisme bergerak untuk berjuang melawan ketidaksetaraan politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender.
2. Memperluas pilihan manusia, kaum feminisme menganggap bahwa laki-laki dan perempuan harus bebas mengembangkan minat, keinginan, serta bakat. Oleh karena itu, kaum feminisme menganjurkan kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki.
3. Menghilangkan stratifikasi gender, kaum feminisme menentang norma dan hukum budaya dan tradisional yang menciptakan ketidaksetaraan gender di bidang sosial dan ekonomi.
4. Mengakhiri kekerasan seksual dan mempromosikan kebebasan seksual, kaum feminisme berpendapat bahwa perempuan harus mengontrol seksualitas mereka tanpa izin dan ancaman laki-laki.

Pendekatan feminisme dalam Hubungan Internasional memperkenalkan gender sebagai alat penting untuk menganalisis interaksi antar negara dalam kerangka internasional. Tetapi untuk membangun konsep feminisme dalam Hubungan

Internasional yang lebih baik, analisis feminisme dianggap hanya berdampak kecil pada politik internasional contohnya dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan suatu keputusan. Peran perempuan dalam menciptakan dan menopang politik internasional dianggap tidak wajar dan tidak layak untuk diteliti. Analisis feminisme berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena masih kurangnya ide-ide feminisme dalam politik internasional karena yang sudah terkonstruksi dalam kehidupan sosial bahwa elite politik internasional hanya untuk laki-laki saja. Oleh karena itu, hanya laki-laki yang dianggap mampu untuk menghadapi isu-isu politik internasional baik itu dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Lascuarín Fernández & Villafuerte Valdés, 2016). Jadi, dalam politik internasional perempuan belum seutuhnya dipercaya untuk memegang suatu jabatan atau mengambil keputusan kebijakan luar negeri karena yang terkonstruksi dalam kehidupan global hanya laki-laki yang dianggap mampu untuk memegang suatu jabatan.

Konsep feminisme menggunakan gender sebagai kategori analisis untuk memahami konstruksi kekuasaan dalam dunia politik. Analisis utama perbedaan gender yang menentukan jenis kelamin yang berbeda tidak didasarkan pada anatomi atau biologis tetapi lebih pada bagaimana gender dikonstruksi. Perbedaan gender ini didasarkan pada sosialisasi tentang bagaimana gender terkonstruksi secara sosial. Sebagai contoh laki-laki dianggap lebih maskulin karena laki-laki mencerminkan rasionalitas, keberanian, dan kuat sedangkan wanita dianggap feminin karena perempuan mencerminkan emosional, lemah, dan bergantung pada orang lain. Gender dianggap sebagai struktur yang menandakan adanya hak untuk berkuasa, dengan kata

lain gender adalah sistem hierarki sosial dimana laki-laki lebih dihargai daripada perempuan. Oleh karena itu feminisme hadir untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender yang sudah lama terkonstruksi dalam kehidupan manusia (Vaiphei, 2015). Jadi, perbedaan gender berasal dari apa yang sudah tertanam dalam kehidupan global sejak dulu. Laki-laki dan perempuan dianggap berbeda sebab laki-laki lebih dianggap maskulin karena lebih berani sedangkan perempuan dianggap feminin karena dianggap lemah.

Feminisme dibedakan menjadi tiga yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme marxis dan sosialis (Effiong & Inyang, 2020). Berikut adalah penjelasan dari ketiga jenis konsep feminisme tersebut:

1. Feminisme Liberal

Secara teoretis, feminisme liberal mengklaim bahwa semua manusia baik itu perempuan maupun laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak sipil dan hak politik. Jadi, perempuan dan laki-laki tidak boleh diperlakukan berbeda di bawah hukum yang berlaku. Feminisme liberal percaya bahwa pemberdayaan perempuan sangat penting untuk dilakukan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mencapai partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang sama. Feminisme liberal menganggap bahwa perempuan juga dapat bersaing secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat untuk mendapatkan posisi dan pekerjaan yang sesuai agar perempuan juga dapat memiliki upah yang adil dalam melakukan

pekerjaan mereka. Fokus feminisme liberal yaitu untuk memberantas diskriminasi perempuan dalam pasar kerja seperti skala upah yang tidak adil dan berusaha untuk menempatkan perempuan pada posisi otoritas dalam pekerjaan bidang apa pun, pemerintah, serta lembaga budaya (Effiong & Inyang, 2020). Oleh karena itu, feminisme liberal ini muncul untuk melawan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan terutama pada dunia kerja.

2. Feminisme Radikal

Beberapa definisi mengatakan bahwa feminisme radikal berfokus sebagai gerakan sosial seperti gerakan pembebasan perempuan yang dimulai pada akhir tahun 1960-an. Yang lain mencoba mendefinisikan feminisme radikal berdasarkan keyakinan yang dianut oleh kaum feminisme radikal yang mengidentifikasi diri seperti politik yang berpusat pada pengalaman hidup perempuan, penekanan pada pembagian kerja secara seksual, atau penolakan terhadap praktik-praktik tertentu seperti pekerjaan seks. Banyak yang mempertanyakan tentang apa tujuan akhir dari feminisme radikal ini, tetapi Caestine Ware mengklaim bahwa feminisme radikal bekerja untuk penghapusan dominasi dan elitisme dalam semua hubungan manusia. Adapun tiga hal utama yang dapat dilihat dari feminisme radikal yaitu keyakinan akan penindasan transitoris perempuan oleh laki-laki, peran hubungan seksual dalam membangun penindasan, serta komitmen untuk emansipasi revolusioner dari patriarki dengan menghapus peran seks atau gender yang menindas perempuan (Duriesmith & Meger, 2020). Dapat disimpulkan bahwa feminisme radikal berfokus pada patriarki atau penindasan dan eksploitasi laki-

laki terhadap perempuan yang dapat ditemukan dimana perempuan dan laki-laki berhubungan satu sama lain baik secara pribadi atau di tempat umum.

3. Feminisme Marxis dan Sosialis

Feminisme marxisme percaya bahwa kapitalisme adalah sumber penindasan yang dialami oleh perempuan. Feminisme marxisme dan sosialis telah mencoba untuk melakukan berbagai pendekatan agar penindasan terhadap perempuan dapat dihilangkan. Feminisme marxisme dan sosialis menganggap bahwa dari adanya kapitalisme banyak perempuan yang mengalami penindasan. Sebagai contohnya adalah perempuan yang bekerja akan terus bekerja untuk mendapatkan upah, sementara majikan akan terus menyuruh pekerja perempuan untuk terus menerus bekerja tanpa menaikkan upah apalagi perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, perempuan di dalam rumah tangga lah yang mengerjakan semua pekerjaan rumah baik itu mengurus anak ataupun membersihkan rumah mereka. Oleh karena itu, feminisme marxisme menanggapi bahwa perempuan menjadi korban atas kekuasaan yang eksploitatif karena status perempuan dalam kehidupan bermasyarakat lebih rendah dibandingkan dengan status laki-laki (Rosalinah et al., 2022). Dengan begitu, feminisme marxisme dan sosialis menganggap bahwa perempuan dalam rumah tangga ini memiliki tanggung jawab yang berat apalagi mereka tidak diberikan upah dalam melakukan pekerjaan rumah tersebut, terlebih lagi apabila perempuan tersebut juga mempunyai pekerjaan lain diluar rumah tangga mereka.

Konsep feminisme sebenarnya menawarkan semacam analisis dan penjelasan terkait bagaimana dan mengapa perempuan memiliki kekuatan ataupun kesempatan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, dan bagaimana ketidakseimbangan ini dapat ditentang dan diubah. Sebagian besar konsep feminisme berfokus pada aksi sosial langsung untuk memprotes lembaga yang didominasi oleh laki-laki dan membentuk sebuah kelompok feminisme untuk mewakili dan menyuarakan kepentingan perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial (Abdulkadir & Winnifred, 2018). Dengan munculnya konsep feminisme, tidak banyak membuat kaum feminisme membuat sebuah gerakan untuk menentang secara langsung apabila terdapat penindasan yang dianggap *urgent* yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan global.

Semua isu yang terkait dengan perempuan kaum feminisme akan mengupayakan untuk menghapus segala bentuk ketidaksetaraan, dominasi, dan penindasan melalui penciptaan tatanan sosial dan ekonomi secara adil baik dalam ranah nasional maupun internasional. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah struktur sosial secara luas maupun individu. Feminisme berfokus pada pengakuan kontribusi perempuan, pengetahuan perempuan, dan membantu perempuan melawan ketakutan mereka sendiri dari perasaan tidak mampu dan rendah diri, serta membantu untuk meningkatkan harga diri dan martabat diri perempuan. Sebagai suatu gerakan politik, feminisme membantu perempuan mandiri secara ekonomi dan memberi perempuan kendali atas tubuh mereka sendiri (Kaur, 2021). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak seutuhnya konsep feminisme yang memberdayakan perempuan, melainkan kapasitas

perempuan itu sendiri yang dapat membuat perempuan mendapatkan tempat yang setara dengan laki-laki. Feminisme hanya membantu perempuan untuk mendapatkan hak mereka, tapi perempuan itu sendiri lah yang dapat menentukan apakah mereka mau untuk mendapatkan posisi yang sama dalam kehidupan global.

Pada tahun 1970-an terjadi penurunan yang luar biasa dalam gerakan feminisme terutama di negara bagian barat. Pada saat itu terdapat kelompok-kelompok politik dan kelompok sosial yang menentang gerakan yang dilakukan oleh kaum feminisme, kelompok tersebut menentang perspektif pemikiran feminisme. Akar pemikiran feminisme berasal dari gerakan aktivisme sosial dan politik. Gerakan-gerakan feminisme ini masih memiliki akses yang sangat terbatas, terlebih lagi di negara-negara berkembang seperti India, Sri Lanka, dan Pakistan. Di negara-negara tersebut hak atas kesetaraan merupakan hal yang masih sulit di dapatkan bagi perempuan, terutama perempuan yang bekerja dan perempuan yang berasal dari bagian terpinggirkan dalam status sosial (Akhtar, 2018). Masih banyak kelompok-kelompok lain yang menentang munculnya kelompok feminisme di berbagai belahan dunia, mereka menentang pemikiran feminisme. Jadi, tidak semua masyarakat global menerima dengan baik kemunculan konsep feminisme ini.

Sejak awal kemunculan konsep feminisme, sangat banyak ide-ide feminisme yang beragam dan sudah diketahui secara luas, seperti: (Ferguson, 2017)

1. Konsep feminisme meragukan pemikiran dualistis, seperti upaya untuk membagi sesuatu yang kompleks menjadi dua variabel dikotomi yang berlawanan contohnya akal dan emosi, pikiran dan tubuh, atau perempuan dan laki-laki).

Pemikiran dualistis juga menghasilkan hierarki, sebab salah satu faktor dalam konflik menjadi dominan atas yang lain, menaturalisasi hubungan yang ada, dan membuatnya lebih sulit untuk ditentang.

2. Pemikiran feminisme umumnya berorientasi pada ide patriarki.
3. Konsep feminisme adalah suatu upaya politik dan intelektual, yang berasal dari rasa bertanggung jawab atas gerakan untuk kesetaraan, kebebasan, dan keadilan.

C. Pemberdayaan Perempuan

Selama tiga dekade terakhir, isu tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus masyarakat di seluruh dunia. Dengan tidak melibatkan perempuan dalam membuat sebuah kebijakan atau program dapat berdampak negatif pada kondisi pembangunan suatu negara. Peran perempuan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab tanpa adanya partisipasi perempuan dalam membuat sebuah kebijakan atau program dapat menghambat pertumbuhan negara. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan merupakan cara yang harus dilakukan oleh suatu negara apabila ingin mengembangkan potensi di negaranya (Neha & Ansari, 2020). Dengan dilakukannya pemberdayaan perempuan bukan hanya membantu negara untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga membantu perempuan agar perempuan dapat lebih sejahtera dalam kehidupannya.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dari tidak berdaya menjadi berdaya. Teori pemberdayaan menekankan dua perspektif utama yaitu, individualitas dan kolektivitas. Individualitas yaitu melalui kapasitas individu perempuan dan

pelaksanaannya bebas berdasarkan pilihan pribadi, sedangkan kolektivitas yaitu melalui perilaku kolektif dan kepatuhan terhadap norma-norma budaya yang menekankan pertumbuhan kolektif. Pemberdayaan perempuan dapat didefinisikan sebagai proses dimana perempuan memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan hidup mereka sendiri sesuai kemampuan mereka untuk mencapai tujuan hidup yang mereka inginkan (Huis et al., 2017). Dengan kata lain, pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf hidup perempuan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Pemberdayaan perempuan sangat penting untuk membantu meningkatkan standar kehidupan perempuan untuk mencegah kejahatan terhadap perempuan, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, memberikan dampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melakukan pemberdayaan perempuan, dapat membantu suatu negara untuk meningkatkan pembangunan bangsa, karena perempuan dapat meningkatkan kapasitas diri mereka dengan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemauan mereka. Apabila pekerjaan yang dilakukan berhasil, maka dapat membantu meningkatkan perekonomian negaranya (Mahbub, 2021). Jadi, apabila pemberdayaan perempuan berhasil dilakukan maka dapat membantu suatu negara untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Terdapat lima tingkat pemberdayaan perempuan yang dapat menunjukkan sejauh mana perempuan bisa setara dengan laki-laki dan menunjukkan bahwa

perempuan telah mencapai pemberdayaan, berikut adalah tingkat pemberdayaan perempuan: (Neha & Ansari, 2020)

1. Kesejahteraan, kesejahteraan merupakan tingkat terpenuhinya kebutuhan materi dasar oleh perempuan seperti makanan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan, dll.
2. Akses, pada tingkat ini diartikan sebagai akses yang setara antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya seperti pendidikan, tenaga kerja, serta layanan publik. Reformasi hukum dan kebijakan pemerintah diperlukan untuk akses yang sama ke sumber daya.
3. Partisipasi, hal ini merupakan tingkat mobilisasi diri perempuan. Perempuan akan memastikan bahwa mereka mendapatkan partisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, serta tingkat perencanaan dan administrasi. Partisipasi yang setara berarti melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi komunitas mereka, dan partisipasi mereka sesuai dengan proporsi komunitas yang lebih luas.
4. Kontrol, hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat membuat keputusan yang diakui sepenuhnya dan menjadi kontrol atas proses pengambilan keputusan melalui penyadaran dan mobilisasi dengan memiliki kontrol keseimbangan atas produksi dan distribusi tanpa adanya dominasi dari satu pihak tertentu.
5. Kesadaran, pada tingkatan ini akan berfokus pada peningkatan tingkat kesadaran bagi perempuan. Dengan membuat perempuan sadar terkait perbedaan antara peran gender dapat membuat perempuan memahami bahwa peran gender hanya didefinisikan secara budaya dan bisa diubah. Apabila perempuan percaya bahwa

peran gender dapat diubah maka dapat memungkinkan untuk mencapai kesetaraan gender. Oleh karena itu, hubungan gender dan pembagian kerja gender harus adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak didasarkan pada dominasi satu sama lain.

Suatu negara tidak dapat berkembang apabila sebagian masyarakatnya juga tidak berkembang. Perempuan merupakan separuh dari populasi dunia dan apa yang akan terjadi apabila perempuan tidak diberdayakan. Oleh karena itu, perempuan harus selalu dilibatkan dalam semua bidang dalam kehidupan dengan begitu kondisi suatu negara akan lebih berkembang. Dapat dikatakan bahwa upaya pemberdayaan perempuan merupakan cara yang paling ampuh untuk membantu mengurangi kemiskinan. Perempuan yang di didik dan diberikan kesempatan akan dapat berkembang dan membuktikan bahwa perempuan juga dapat unggul pada profesi dan karir yang sudah mereka jalankan. Pemberdayaan perempuan berarti kesetaraan, perempuan berhak untuk diberikan kebebasan yang sama untuk menentukan jalan hidup mereka (Farzana et al., 2018). Jika perempuan tidak memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidup mereka maka tentunya akan berdampak pada perkembangan negaranya.

Pemberdayaan perempuan dapat dibedakan dalam lima jenis yaitu sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan psikologis. Berikut adalah penjelasan jenis-jenis pemberdayaan perempuan tersebut:

1. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merujuk pada kemampuan perempuan untuk meningkatkan hubungan sosial dalam masyarakat agar posisi perempuan dalam struktur sosial dapat

dihargai. Pemberdayaan sosial perempuan dianggap sebagai cara agar perempuan bisa mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri mereka. Dengan begitu perempuan dapat memberikan kontribusi pada lingkungan tempat tinggal mereka dan di dalam keluarga mereka (Rahman, 2020). Dengan melakukan pemberdayaan, perempuan dapat menikmati hak, status, serta kebebasan mengembangkan diri yang sama dengan laki-laki.

2. Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek utama yang mendukung individu untuk mengembangkan potensi diri, intelektual, kesejahteraan, dan potensi pemberdayaan. Pendidikan dianggap sebagai aspek yang sangat penting dalam transformasi bidang sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, perempuan wajib untuk diberikan pendidikan agar perempuan dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, sebab pendidikan dapat membantu perempuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, harga diri, serta kemandirian perempuan (Rahman, 2020). Oleh karena itu, pendidikan sangat mempunyai peran yang besar dalam pemberdayaan perempuan.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi juga merupakan aspek yang paling dibutuhkan dalam memberdayakan perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan mencakup kemampuan perempuan berpartisipasi dalam bidang ekonomi dan berhak untuk mengontrol sumber daya yang ada agar perempuan bisa mendapatkan akses pekerjaan yang layak, kontrol atas waktu, kehidupan, dan tubuh mereka sendiri. Perempuan juga berhak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekonomi baik itu dalam

rumah tangga mereka ataupun dalam kehidupan sosial (Mahbub, 2021). Apabila perempuan memiliki pekerjaan maka mereka dapat menghasilkan uang dan dapat memberikan kontribusi pada keluarganya hal itu menunjukkan bahwa perempuan memiliki jiwa kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan.

4. Pemberdayaan Politik

Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan suatu aspek yang penting untuk melakukan pemberdayaan. Dengan adanya partisipasi perempuan dalam semua tingkatan struktur pemerintahan dapat dengan cepat membantu perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Politik memutuskan siapa yang akan mendapatkan apa dan berapa banyaknya. Pemberdayaan perempuan berarti mendistribusikan kekuasaan dan otoritas yang setara antara laki-laki dan perempuan dan menciptakan lingkungan yang bebas dari dominasi dan penindasan (Rahman, 2020). Dengan bergabung dalam dunia politik, perempuan dapat mengubah dan berpengaruh dalam keputusan publik, perempuan juga akan merasa dirinya diberdayakan dan mereka dapat melindungi kepentingan pribadi serta hak-hak mereka agar bisa mendapatkan keadilan.

5. Pemberdayaan Psikologis

Melalui pemberdayaan psikologis, perempuan dapat mengubah diri dan subjektivitas mereka. Ketika perempuan bekerja pada lembaga pendidikan ataupun partai politik dan dilibatkan dalam pembuatan suatu keputusan, mengambil keputusan, serta melakukan pekerjaan keluar kota, perempuan dapat merasa bahwa mereka pantas

untuk dilibatkan dan secara psikologis dapat membantu perempuan untuk mengembangkan kepercayaan diri, lebih mengenali diri, serta dapat mengendalikan diri mereka. Tak hanya itu, perempuan juga akan mempunyai kekuatan mental yang bisa membuat mereka lebih kuat, tangguh, pekerja keras, dan memberikan rasa kepuasan pada diri mereka.

Upaya pemberdayaan perempuan dilalukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menyadari pentingnya kesetaraan gender. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, tempat tinggal, serta pendidikan yang dimana perempuan dan laki-laki bisa merasakannya. Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara, membangun masyarakat yang stabil dan adil, serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Pemberdayaan perempuan dapat meliputi tiga hal yaitu *capacity building*, perubahan budaya, dan penyesuaian struktural. *Capacity building* berarti membangun atau meningkatkan kemampuan perempuan, sementara perubahan budaya berarti melakukan perubahan budaya yang berpihak pada perempuan, dan penyesuaian struktural berarti merubah struktur yang sudah ada di masyarakat yang dapat membantu perempuan meningkatkan kemampuannya (Purnamawati & Utama, 2019). Sebelum melakukan usaha pemberdayaan perempuan, sebaiknya hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dari perempuan itu sendiri agar mereka dapat mengembangkan dirinya dengan baik serta menyeluruh agar tujuan dari usaha pemberdayaan perempuan dapat dicapai.

Pada era modern seperti sekarang banyak perempuan yang telah memperlihatkan potensi dan keunggulan mereka di berbagai macam bidang pekerjaan. Banyak perempuan yang telah membuktikan bahwa mereka dapat setara dengan laki-laki, tetapi masih ada pengaturan sosial dan diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat yang menghambat perempuan untuk bisa lebih mengembangkan kemampuan mereka padahal dengan memberdayakan perempuan dapat membantu kemajuan suatu negara. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga memiliki peran yang penting untuk membantu pembangunan negaranya (Neha & Ansari, 2020). Oleh karena itu, perempuan harus menyadari potensi yang mereka miliki dan tidak menganggap diri mereka lemah baik itu secara psikologis, mental, dan fisik.

Pemberdayaan perempuan mengacu pada proses partisipasi perempuan dalam proses sosial, ekonomi, dan politik. Partisipasi penuh perempuan dan laki-laki dalam semua bidang tersebut sangat diperlukan agar taraf kehidupan manusia dapat meningkat. Tetapi perempuan sering kali mengalami kesulitan untuk ikut secara penuh dalam berpartisipasi dalam bidang perekonomian, karena masih banyak perempuan yang bekerja namun tidak mendapatkan hasil atau upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah terkonstruksi bahwa perempuan lebih cocok dianggap sebagai ibu rumah tangga dan kurang cocok untuk bekerja yang mengakibatkan kesenjangan upah akibat perbedaan gender masih banyak dirasakan oleh perempuan (Firmansyah & Sihaloho, 2021). Hal tersebut merupakan salah satu tantangan dari proses pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan di setiap pelosok bumi sangat penting agar suatu negara memiliki bangsa yang cemerlang dan masa depan yang stabil. Semakin bagus pendidikan yang ditempuh oleh perempuan dari kecil maka semakin besar juga kemungkinan pendidikan yang akan didapatkan oleh keturunannya berkualitas. Apabila sebuah keluarga atau kelompok masyarakat memberikan dukungan penuh untuk memberdayakan perempuan dengan memberikan pendidikan, kesehatan, sarana keuangan, serta keamanan yang berkualitas dalam lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, maka perempuan tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan sebuah negara (Farzana et al., 2018). Lingkungan tempat tinggal dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pemberdayaan perempuan, jika lingkungan sekitar mendukung penuh pemberdayaan perempuan maka perempuan dapat merasa bebas untuk mengembangkan kemampuan mereka agar tujuan hidup yang mereka mimpikan dapat terealisasi.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) mempunyai target untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan untuk semua perempuan dan anak-anak perempuan. Untuk meningkatkan dampak program serta kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan gender, langkah utama yang harus dipahami adalah mengetahui bagaimana kasus ketidaksetaraan di seluruh dunia dengan melakukan identifikasi bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus ini. Dalam beberapa tahun terakhir, sangat banyak program pemberdayaan perempuan di belahan dunia yang gagal dilakukan terbukti dengan masih banyak perempuan yang mengalami penurunan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu contohnya

adalah di negara Afrika Sub-Sahara khususnya di Uganda, disana laki-laki memiliki kendali besar atas kehidupan perempuan terutama dalam kehidupan sosial khususnya dalam keluarga dan rumah tangga, sehingga perempuan di Uganda sulit untuk menyejahterakan diri mereka sendiri (Yaya et al., 2018). Sebelum melakukan program pemberdayaan perempuan, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah hal apa yang menyebabkan perempuan tersebut mengalami ketidaksetaraan gender di lingkungannya, sehingga perempuan sulit untuk bergerak bebas dalam menjalani kehidupannya. Dengan mengetahui penyebabnya, program pemberdayaan perempuan yang akan dilakukan nantinya bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan perempuan.